

***FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**BENARANGGI EVRANA OKTAVIARI
NIM : 18622055**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

***FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Serjana Akuntansi

OLEH

**BENARANGGI EVRANA OKTAVIARI
NIM : 18622055**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan kepada :

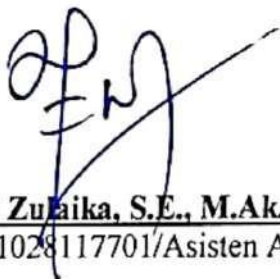
Penitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : BENARANGGI EVRANA OKTAVIARI
NIM : 18622055

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak, CA
NIDN : 1028117701/Asisten Ahli

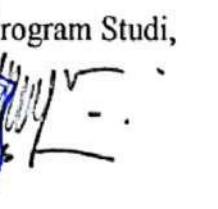
Pembimbing Kedua,



Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak
NIDK : 8968410021/Asisten Ahli

Menyetujui,



Ketua Program Studi,

Lenny Satria, S.E., M.Ak
NIDN : 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

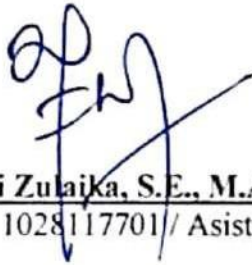
Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : BENARANGGI EVRANA OKTAVIARI
NIM : 18622055

Telah dipertahankan di depan Panitia Komusi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Dua
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dan Dinyatakan
Telah Mengikuti Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

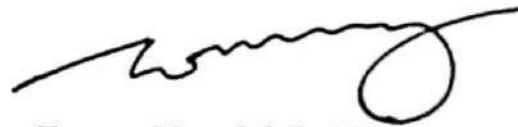


Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak, CA
NIDN : 1028117701 / Asisten Ahli

Sekretaris,



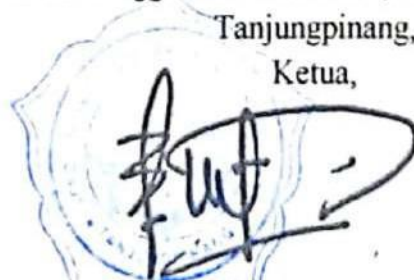
M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN : 1025129302 / Asisten Ahli
Anggota,



Tommy Munaf, S.E., M.Ak
NIDN : 1016048202 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 22 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Benarangi Evrana Oktaviari
NIM : 18622055
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.42
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudia hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 2 Agustus 2022



BENARANGGI EVRANA OKTAVIARI
NIM : 18622055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya untuk memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada surgaku Mama Efi Asfirawati dan Bapak Ari Purnomo yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah mama dan papa berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada kedua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia.

Kuucapkan terimakasih kepada keluarga besar Nekcu Herdawati dan keluarga yang sangat ku sayangi yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Untuk teman-temanku sekalian, terimakasih selama ini telah menjadi pendengar keluh kesahku, menemani disaat susah maupun senang, dan canda tawa yang memberikan warna yang tidak akan pudar. Terimakasih dukungannya.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

-Q.S Ar-Rad 11

“Angin tidak berhambus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya.”

-Ali bin Abi Thalib

“Tidak harus selama sama, 1000 manusia akan memandang dan melihat dengan
caranya masing-masing. Percaya dirilah dan jangan takut untuk berbeda”

-Bena

-Today is your opportunity to build the tomorrow you want-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis junjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak, CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak, CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak, CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
6. Ibu Nurfitri Zulaikha, S.E., M.Ak.Ak, CA selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan, saran, perbaikan dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
7. Bapak Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pimpinan beserta staf BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.
9. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
10. Kepada kedua orangtua dicintai yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, Papa Ari Purnomo dan Mama Efi Aspirawati.
11. Kepada keluarga yang disayangi : Herdawati, Sutrisno, Yola Fitriani, Agustiar Frianto, Azira, Aldevaro dan semua yang telah mendukung memberi semangat dan mendoakan tidak bisa disebutkan satu-satu.
12. Untuk teman-teman : Ariane Bintani Puteri, Nadila Andra Kurnia, S.M , Siti Nur Afisa, Widia Agustiwi, Esti Kurniawati, Destina Veronika Marbun, Haigustina, Frinica Exlesia, Fitri Rahmadani, Esa Hikma Nurillah, Afrizal Anggara, Melya Apriani, Dewi Nopitasari, Tri Rahmawati Nur Dini, Safiera Dila Salsabila, Aisyah Afifah, Elsa Afsari, Raja Reggy Yessychanthia, S.Ak , Divani Allysa Syaputri, Ratih Anjelita dan teman-teman yang tidak bisa di

sebutkan satu persatu yang telah membantu, menyemangati dan direpotkan dalam pembuatan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 dan teman kelas Akuntansi Pagi 2 yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, teman-teman HIMA Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang, dan teman KKN JOURNEY KAMPUNG BULANG yang membantu, menyemangati, dan memberikan rasa kekeluargaan.
14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.
15. *Last but nor least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wannathank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswa Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Agustus 2022

BENARANGGLEVRANA OKTAVIARI
18622055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitan	6
1.5.1 Kegunaan Praktis	7
1.5.2 Kegunaan Teoritis.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Otonomi Daerah.....	9
2.1.2 Dana Alokasi Umum	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	16

2.1.4 Belanja Daerah.....	20
2.1.5 <i>Flypaper Effect</i>	25
2.2 Kerangka Pemikiran	27
2.3 Hipotesis Penelitian	28
2.4 Penelitian Terdahulu.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Jenis Data	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Definisi Operasional Variabel	35
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.6.1 Statistik Deskriptif	39
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
3.6.4 Uji Hipotesis	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.2 Penyajian Data	52
4.1.3 Analisis Data.....	53
4.2 Pembahasan	68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	xviii
-----------------------------	--------------

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Presentase Data Tahun 2015 dan 2016.....	3
2.	Definisi Operasional Variabel.....	36
3.	Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi.....	44
4.	Data Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran.....	52
5.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	53
6.	Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov).....	56
7.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
8.	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
9.	Tabel Durbin-Watson.....	59
10.	Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Korelasi.....	59
11.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	61
12.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
13.	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	64
14.	Tabel F.....	65
15.	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	66
16.	Tabel t.....	67

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	28
2.	Contoh Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	41
3.	Contoh Pola Grafik <i>Scatterplot</i>	44
4.	Hasil Uji Normalitas (Grafik Histogram).....	55
5.	Hasil Uji Normalitas (Normal Probability Plot).....	56
6.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1 :	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2 :	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017-2021
Lampiran 3 :	Hasil Pengujian SPSS
Lampiran 3 :	Cek Plagiasi

ABSTRAK

FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Benarangi Evrana Oktaviari. 18622055. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Benarangi123@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau periode 2017-2021. Objek penelitian ini berfokus pada 5 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengakses Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui situs www.kepri-ppid.bpk.go.id. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode regresi linier berganda dengan *software* SPSS 25, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam pengujian parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada tingkat signifikansi 5%. Jika dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau lebih dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pada Dana Alokasi Umum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya *Flypaper Effect*. Dapat dilihat dari Dana Alokasi Umum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,495, sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,190. Sehingga terlihat bahwa nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun simultan dan tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaikha, S.E., M.Ak.Ak, CA

Dosen Pembimbing 2 : Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak

ABSTRACT

FLYPAPER EFFECT ON GENERAL ALLOCATION FUNDS AND REGIONAL ORIGINAL REVENUE ON REGIONAL EXPENDITURES OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS OF PROVINCE RIAU ISLAND

Benaranggi Evrana Oktaviari, 18622055. Accounting. STIE Pembangunan
Tanjungpinang.

Benaranggi123@gmail.com

The study aims to demonstrate how Flypaper Affects General Allocation Fund and Native Income to the regional government spending of the 2017-2021 chapters. The object of this study focuses on 5 districts and 2 cities in the Riau Island Province by accessing the Regional Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: APBD) through www.kepri-pppid.bpk.go.id. The method used in this study is the quantitative method. The data analysis used is the linear regression analysis method.

Based on the results of data processing using the multiple linear regression method with SPSS 25 software. The conclusion acquired is the General Allocation Fund and Native Income have a significant effect on Regional Expenditures. The partial test shows that the General Allocation Fund and Native Income have a positive and significant influence on Regional Expenditures at a significance level of 5%. If viewed more deeply, the level of dependence on regional expenditures of the Regency/City Government of the Riau Islands is more dominant on Native Income than the General Allocation Fund. This shows that there is no Flypaper Effect. It can be seen from the General Allocation Fund has a T-count value of 2,495, while Native Income has a T-count value of 6,190. Thus it appears that the value of the T-count General Allocation Fund is smaller than that of the T-count Native Income.

It can be concluded that the General Allocation Fund and native income affect Regional Expenditures either partially or simultaneously and there is no Flypaper Effect on General Allocation Funds and Native Income on Regional Expenditures for the Regency/City Government of the Riau Islands Province.

Keywords: *General Allocation Fund, Native Income, Regional Expenditures, and Flypaper Effect*

Supervisor 1 : Nurfitri Zulaikha, S.E., M.Ak.Ak, CA

Supervisor 2 : Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang melewati pertumbuhan yang sangat cepat, seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki wilayah otoritasnya masing-masing diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain juga memberikan aliansi tanggungjawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu tujuan dari otonomi daerah yakni mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan tercapai (Liando, 2017).

Anggaran belanja daerah merupakan rancangan kebijakan keuangan yang harus mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat dan kemampuan di setiap daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Aliferiana Irsyadhea Putri, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa anggaran belanja daerah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilitas. Dari beberapa fungsi tersebut terdapat tantangan dan masalah dalam fungsi alokasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat mentransfer ke pemerintah daerah berupa dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Penggunaan dana dari Pemerintah Pusat diharapkan bisa digunakan Pemerintah Daerah dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

Permasalahan yang timbul dalam Dana Alokasi Umum ini terletak pada perbedaan pemahaman fungsi oleh pemerintah pusat atau daerah. Pemerintah pusat memberikan dana ini untuk pemerataan keuangan antar daerah. Sedangkan pemerintah daerah menganggap pemberian dana ini untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Perbedaan ini yang menyebabkan respons Dana Alokasi Umum lebih banyak digunakan Pemerintah Daerah untuk keperluan Belanja Daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri atau dikenal dengan istilah *Flypaper Effect* (Wahyuni & Supheni, 2017). *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespons belanja daerahnya lebih banyak

berasal dari transfer/*grants* yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) dari pada pendapatan asli daerahnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah (Rahmawati & Suryono, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, serta pinjaman pemerintah. Penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) (Mulya & Bustamam, 2016). Masalah yang dialami suatu daerah pada umumnya berhubungan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD yang masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah bisa mengakibatkan kebocoran yang sangat berarti bagi daerah (Mulya & Bustamam, 2016).

Berikut presentase data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 1.1
Data Tahun 2015 dan 2016

Variabel	Tahun 2015	Presentase Tahun 2015	Tahun 2016	Presentase Tahun 2016
Dana Alokasi Umum	Rp 2,082,937,645,000.00	41,2%	Rp 2,822,469,650,000.00	55,8%
Pendapatan Asli Daerah	Rp 1,579,614,558,897.00	47,8%	Rp 1,387,133,117,298.00	42%
Belanja Daerah	Rp 6,662,564,034,593.00	47,4%	Rp 7,385,476,580,207.00	52,6%

Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2012-2016 menyatakan bahwa terdapat *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Yang artinya respons Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Dana Alokasi Umum lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai semua pengeluarannya.

Aliferiana Irsyadhea Putri dan Haryanto (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi *flypaper effect*. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya bergantung pada jumlah Dana Alokasi Umum dibandingkan Pendapatan Asli Daerah.

Luluk Atika Rahmawati dan Bambang Suryono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari Dana Alokasi Umum dalam membiayai segala kewenangannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect*. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut mampu membiayai segala kewenangannya dalam menjalankan otonomi daerah atau dengan kata lain daerah tersebut bisa mandiri tanpa bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*), karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah, apakah terdapat *Flypaper Effect* dari pengaruh tersebut pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Dua hal yang mungkin terjadi dalam penelitian ini adalah terdapat atau tidak terdapat *Flypaper Effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Dengan ini judul yang penelitian yang diangkat adalah:

“FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang lingkup yang terlalu lebar sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat kemungkinan terdapat *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau dengan periode penelitian 2017-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian telah selesai dilakukan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan. Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan dapat mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta bisa diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengetahuan penulis.

2. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang artinya aturan atau undang-undang. Maka otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah.

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah (Kurniawan, 2012).

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah.

Pelaksanaan otonomi, sebagai salah satu pilihan sistem yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena otonomi adalah sebagai usaha membagi rata tanggung jawab pemerintahan pusat. Kemudian beban tanggung jawab dibagi ke pemerintahan lokal, sampai yang paling bawah (Makhfudz, 2013).

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah (Syukri & Hinaya, 2019).

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah (Salawali et al., 2019).

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, juga kewajiban untuk mengatur juga mengurus sendiri pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum atau yang disingkat dengan DAU adalah bagian dari TKD atau Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. TKD sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepala daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum seluruhnya dikelola penggunaannya oleh kepala daerah dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik kepada seluruh warga di daerah itu sendiri, maka dari itu Dana Alokasi Umum ini bersifat *block grant* (Liando, 2017).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (Wahyuni & Supheni, 2017).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Salawali et al., 2019).

Dana alokasi umum ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Haryani, 2017).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum atau yang disingkat dengan DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan suatu daerah dalam membiayai segala kebutuhan pengeluaran pembelanjaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran Dana Alokasi Umum sekurang kurangnya adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum disesuaikan dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota. Apabila belum terhitung, akan ditetapkan dengan perbandingan 9:1 yaitu kabupaten/kota dan 10% untuk provinsi.

Adapun beberapa tahapan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) antara lain:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia atas memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi Dana Alokasi Umum antara Pemerintah dengan Panitia kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum.

Formulasi dalam Dana Alokasi Umum antara lain:

1. Formula Dana Alokasi Umum

Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus formula Dana Alokasi Umum :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana:

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2. Variabel Dana Alokasi Umum

a. Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*)

Digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah yang terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

b. Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*)

3. Metode Perhitungan Dana Alokasi Umum

a. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya ($t-1$) yang meliputi gaji pokok dan

tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi Dana Alokasi Umum Celah Fiskal nasional. Untuk suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF (Kebutuhan Fiskal) dengan KpF (Kapasitas Fiskal).

Rumus perhitungan Dana Alokasi Umum :

1. Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$KbF = TBR (\delta_1 IP + \delta_2 IW + \delta_3 IPM + \delta_4 IKK + \delta_5 IPDRB/Kap)$$

Dimana:

TBR : Total Belanja Rata-rata APBD

IP : Indeks Jumlah Penduduk

IW : Indeks Luas Wilayah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/Kap : Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita

δ : Bobot Indeks

2. Kapasitas Fiskal (KpF)

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA : Dana Bagi Hasil dari Penerimaan SDA

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut beserta kontribusi dari masyarakat daerah setempat yaitu dari pajak atau retribusi (Abdullah et al., 2015).

Pendapatan Asli Daerah ialah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Wahyuni & Supheni, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari:

1. Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak yang dikelola oleh pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
- 1) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - 2) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - 3) PAB (Pajak Alat Berat), adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 - 4) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat), adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 - 5) PAP (Pajak Air Permukaan), adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - 6) Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
 - 7) Opsen Pajak MBLB (Opsen Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan), adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

- 2) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 - 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 - 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - 5) PAT (Pajak Air Tanah) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - 6) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
 - 8) Opsen PKB, dan (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor), adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Opsen BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan), adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
2. Retribusi Daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Objek retribusi daerah ada tiga, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha ialah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu ialah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut I Made (2014) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- f. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- m. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

2.1.4 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai (Kainde, 2013).

Belanja Daerah ialah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri (Simanjuntak et al., 2013).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun beberapa fungsi dari belanja daerah, antara lain:

1. Untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Yang termasuk ke dalam belanja operasi, antara lain:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan atas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang atau barang kepada individu, keluarga kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Yang termasuk ke dalam belanja modal, antara lain:

a. Belanja Tanah

Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ialah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer ialah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Yang termasuk ke dalam belanja transfer, antara lain:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

2.1.5 Flypaper Effect

Flypaper effect adalah suatu fenomena pada *unconditional grant* yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat (Oktavia, 2014).

Flypaper effect merupakan respon dari kenaikan dan turunnya penggunaan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat (Aliferiana Irsyadhea Putri, 2019).

Flypaper effect merupakan kondisi dimana Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) dibandingkan dengan pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga dapat mengakibatkan pemborosan pada belanja daerah. Transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) yang diprosikan dengan dana alokasi umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan dari pemerintah pusat (Fahmi & Riharjo, 2018).

Flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena ini dapat terjadi dalam dua versi. Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah (I Made, 2014).

Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari transfer/*grants* (DAU, DAK, dan DBH) dibandingkan pendapatan asli dari daerahnya sehingga dapat berakibat pemborosan dalam belanja daerah, maka hal itu menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect* (Ekawarna, 2017).

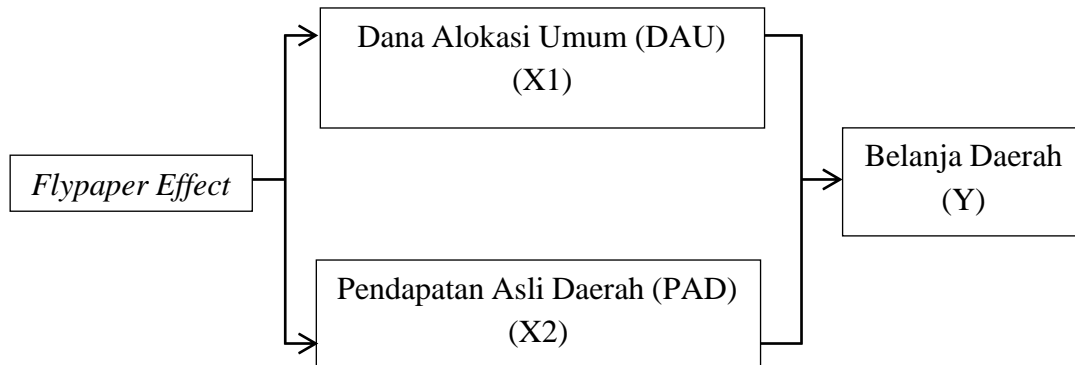
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* adalah suatu fenomena yang terjadi saat pemerintah daerah merespons belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum dari pada menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Flypaper effect membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri. *Flypaper Effect* muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumen barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah (Mulya & Bustamam, 2016).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu kerangka berfikir tentang apa yang akan dikemukakan dalam penelitian tersebut. Menurut Rumengan (2015) kerangka pemikiran ialah suatu teori atau dasar teori yang telah melalui berbagai sintesa teori yang berdasarkan dari fakta, observasi, serta penelaah keputusan. Oleh karena itu, yang terkandung dalam suatu kerangka pemikiran ialah hubungan dari pengaruh, komparatif antara variabel-variabel yang saling terlibat dalam penelitian tersebut, serta menjelaskan tentang variabel-variabel yang saling berkaitan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data sekunder yang diolah penulis (2022)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang turunkan dari kerangka pemikiran yang dibuat. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian (Sujarweni, 2015).

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Untuk itu, diperlukan data atau fakta untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Hipotesis dibuat berdasarkan pemikiran teoritis atau dari penelitian pendahuluan. Hipotesis yang baik harus jelas dan spesifik dapat diuji (Timotius, 2017).

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
2. H_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

3. H_3 : Terdapat *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun referensi penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017)

Penelitian ini berjudul “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Serta apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui publikasi. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012-2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016 yang artinya respon Pemerintah Daerah Nganjuk terhadap Dana Alokasi Umum lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai semua pengeluarannya.

2. Aliferiana Irsyadhea Putri dan Haryanto (2019)

Penelitian ini berjudul “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Belanja Daerah (BD) dan memberikan gambaran empiris bukti apakah *Flypaper Effect* terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang telah diaudit pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari data tersebut diperoleh data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah periode 2013-2017.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja daerah dan terjadi *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dikarenakan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar komposisinya

dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti dalam memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

3. Rahmatul Mulya dan Bustaman (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh hubungan *Flypaper* terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan dokumentasi berupa data perkembangan PDRB Regional Kota Banda Aceh selama tahun 2008-2014.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *flypaper effect* pada PAD dan *flypaper effect* pada DAU secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada alokasi belanja modal, *flypaper effect* pada PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alokasi belanja modal, dan *flypaper effect* pada DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alokasi belanja modal.

4. Rumanintya Lisaria Putri, Nazief Nirwanto, Prihat Assih, dan Wayan Darmawan (2020)

Penelitian ini berjudul “*The Importance of Regional Original Income, Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional*

Government Expenditure". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan demografi pada *Flypaper Effect*.

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory research* dengan data sekunder yaitu dokumentasi. Dengan metode *sampling* sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, Dana Perimbangan (DP) berpengaruh langsung positif terhadap belanja daerah, Demografi (DM) berpengaruh langsung positif terhadap belanja daerah, PAD berpengaruh langsung negatif terhadap *flypaper effect*, demografi tidak berpengaruh terhadap *flypaper effect*, dan belanja daerah berpengaruh langsung positif terhadap *flypaper effect*.

5. Eni Nur Puji Astutik dan Antonius Diksa Kuntara (2017)

Penelitian ini berjudul "*Flypaper Effect and Factors Affecting Regional Government's Expenditure at Districts of Yogyakarta Special Region Province 2008-2014*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah serta untuk mengkonfirmasi terjadinya *Flypaper Effect* pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan teknik dokumentasi. Data yang didapatkan lalu dianalisis dengan analisis regresi data panel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten yang terdaftar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2014.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, adanya *flypaper effect* terhadap belanja kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Belanja Daerah lebih besar karena transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari komponen Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi masih bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang data penelitiannya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan statistik (Sugiyono, 2017).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel bebas (independen) dan Belanja Daerah sebagai variabel terikat (dependen).

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data melainkan melalui perantara orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data yang akurat sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumenter berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau mengenai data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah. Data yang diperoleh dari Website Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kepulauan Riau www.kepri-ppid.bpk.go.id

2. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan referensi dari jurnal dan buku-buku di perpustakaan dan hasil dari penelitian terdahulu dengan permasalahan yang sama.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian teoritis variabel sehingga dapat diukur dan diamati. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Dana Alokasi Umum (X ₁)	Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. <i>Sumber: Liando dan Hermanto, 2017</i>	$DAU = \text{Bobot Kabupaten/Kota} \times \text{jumlah DAU kabupaten dan kota dalam kelompok Kabupaten/Kota}$ $\text{Bobot Kab/Kota} = \frac{CF \text{ Kab/Kota}}{\sum CF \text{ Kab/Kota}}$ <i>Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang disahkan}$

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<i>Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>
Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tak Terduga + Transfer
	<i>Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>	<i>Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>

Untuk *flypaper effect* tidak dijabarkan dalam definisi operasional. Hal ini dikarenakan *flypaper effect* merupakan situasi yang dihasilkan oleh ketiga variabel di atas. Dimana ketika koefisien Dana Alokasi Umum lebih berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada Pendapatan Asli Daerah maka, situasi ini disebut *flypaper effect*.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Menurut Misbahuddin & Hasan (2013) pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Teknik pengolahan data bertujuan untuk menginterpretasikan hasil data dan menarik kesimpulan.

Adapun rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota yaitu:

$$\text{DAU} = \text{Bobot Kabupaten/Kota} \times \text{jumlah DAU Kabupaten/Kota dalam kelompok Kabupaten/Kota}$$

$$\text{Bobot Kab/Kota} = \frac{CF \text{ Kab/Kota}}{\sum CF \text{ Kab/Kota}}$$

Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Adapun rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang disahkan}$$

Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Adapun rumus untuk menghitung Belanja Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga} + \text{Transfer}$$

Sumber: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan analisis yang terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2018). Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran suatu data yang dihubungkan dengan variabel dalam penelitian. Dalam penyajian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus berdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Maka itu untuk melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2018).

Uji asumsi klasik dalam penelitian adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

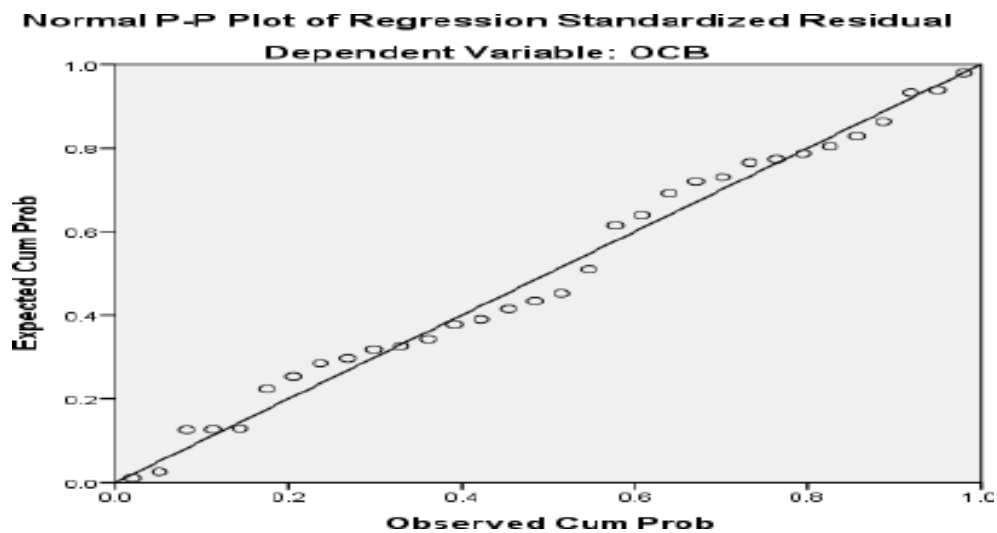
3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu:

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 3.1
Contoh Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : www.google.com

2. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual (Ghozali, 2018).

Nilai z statistik untuk menghitung nilai *kurtosis* dapat dihitung dengan rumus:

$$Z \text{ Kurtosis} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24/N}}$$

Sumber: Ghozali (2018)

Sedangkan nilai z *skewness* dapat dihitung dengan rumus :

$$Z \text{ Skewness} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

Sumber : Ghozali (2018)

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual ialah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) dimana jika hasilnya menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data terdistribusi dengan normal, namun apabila hasilnya menunjukkan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi dengan tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya

korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

3. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan regresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \geq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering dijumpai pada data runtut waktu (*time series*).

Menurut Ghozali (2018), untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin-Watson* (WS test).

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

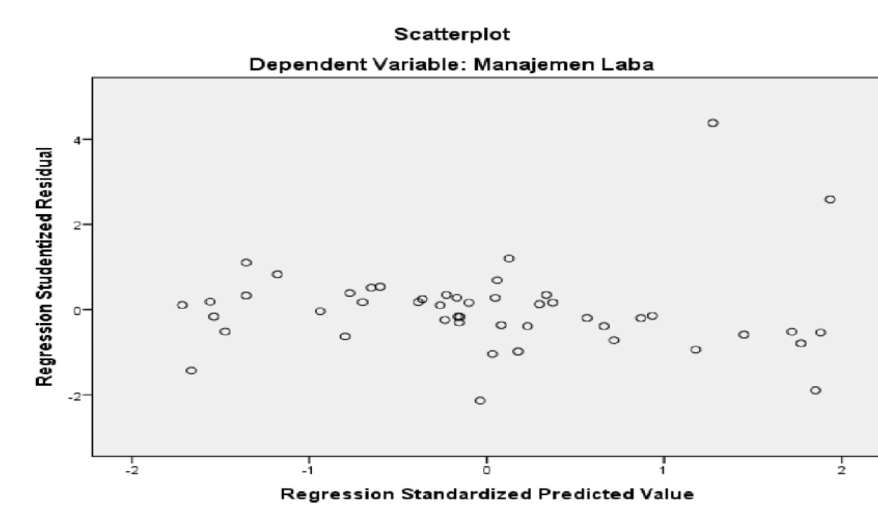
Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$D_u < d < 4 - D_u$

Sumber : Ghozali (2018)

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya.

Gambar 3.2
Contoh Pola Grafik *Scatterplot*



Sumber : www.google.com

Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas, antara lain:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan ialah alat yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pendapatan yaitu PAD dan DAU dalam mempengaruhi belanja daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS.

SPSS (*Statistic and Service Solution*) adalah suatu *software* komputer yang berfungsi untuk menganalisis data statistik. Program SPSS memiliki tampilan *user friendly* dan cara penggunaan yang mudah. Dengan SPSS akan membantu menyingkat waktu atau efisiensi kegiatan dalam menganalisis data. Hal ini dikarenakan dengan SPSS kita tidak membutuhkan perhitungan secara manual yang menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis data. SPSS secara otomatis melakukan perhitungan dan memberikan hasil keluaran yang tepat dengan mudah dianalisis termasuk juga dalam pengambilan keputusan yang tepat. SPSS yang digunakan dalam penelitian adalah SPSS versi 25 (Priyatno, 2018).

Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y : Belanja Daerah

a : Konstanta

β : Koefisien regresi

X1 : PAD

X2 : DAU

e : *Error term*

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji Koefisien Determinasi parsial (R²), untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini diukur dengan nilai *Adjusted R-Square* dimana nilai koefisien determinasinya berada di antara nilai 0-1, nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan semakin lemah sebaliknya nilai yang mendekati 1 menandakan hubungan semakin kuat (Bahri, 2018).

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F atau uji simultan merupakan pengujian hipotesis semua variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen

(Belanja Daerah) dan juga untuk menentukan model kelayakan model regresi.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $\text{Sig.t} \geq 0,05$, hal ini berarti model yang dipilih tidak layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai $\text{Sig.t} \leq 0,05$, hal ini berarti model yang dipilih layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$, hal ini berarti bahwa model yang dipilih tidak layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta H_0 ditolak H_a diterima jika $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$, hal ini berarti model yang dipilih layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Bahri, 2018).

3.6.4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t atau uji parsial, untuk menguji pengaruh variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) secara individu terhadap variabel dependen (Belanja Daerah). Dengan hipotesis dalam uji t yaitu:

H_0 : Variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H_a : Variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh signifikan) jika nilai $\text{Sig.t} \geq 0,05$ dan H_0 ditolak dan H_a diterima (ada pengaruh yang signifikan) jika nilai $\text{Sig.t} \leq 0,05$.
2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$ dan H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ (Bahri, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 41(3).
- Aliferiana Irsyadhea Putri, H. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 747–757.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS* (E. Risanto (ed.)). ANDI.
- Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan. (2016). *Dana Alokasi Umum*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>
- Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 2338–4603.
- Fahmi, M. R., & Riharjo, I. B. (2018). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. <http://eprints.polsri.ac.id/5389/>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. UNDIP.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryani. (2017). Analisis Flypaper Effect Pada Pmerataan Daerah Kabupaten Bireuen. 18(2), 6–18.
- I Made, P. A. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Ilmiah Akuntansi Dan Himanika Jinah*, 3(2).

- JDIH BPK RI. (2014). Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Undang-Undang, 1–311*, 1–311.
- Kainde, C. (2013). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3)*, 393–400.
- Kris, H. T. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian (ANDI)*.
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *E-Jurnal Unisfat, Vo.7, No.2*.
- Liando, I. . dan S. . H. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No, 1–11*.
- Makhfudz, M. (2013). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum, Vol.3, No.*
- Misbahudin, I. H. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah/ Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(2)*, 190–198. lib.unnes.ac.id/6871/1/8479.pdf%0Ahttp://www.albayan.ae
- Nur, E., Astutik, P., & Kuntara, A. D. (2017). Flypaper Effect and Factors Affecting Regional Government ' s Expenditure at Districts of Yogyakarta Special Region Province 2008 - 2014. *Foura.Org, 2017*. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta. *Foura.Org, Maimunah 2006*.
- Oktavia, D. (2015). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 12(2)*, 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1407>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum, 184*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–445.

- Prawito, M. (2019). *Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Dasar Hukum, Prinsip, Hakikat Otonomi Daerah*. Maxmanroe.Com. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-otonomi-daerah.html>
- Priyatno, D. (2018). SPSS HANDBOOK. In *Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik*. MediaKom.
- Putri, R. L., Nirwanto, N., Assih, P., & Darmawan, W. (2020). The Importance of Regional Original Income, Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional Government Expenditure. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 7(2), 33–45.
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 59–70.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. H. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpek.12790.18.2.2016>
- Simanjuntak, L. L. F., Ahmad, S., Ika, S. F., & Hasni, Y. (2013). Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure. *The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia*, 1–29.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>

Wahyuni, S. E., & Supheni, I. (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *VOL. 1 NO.*

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Benaranggi Evrana Oktaviari
Jenis Kelamin : Female
Tempat / Tanggal Lahir : Serasan, 6 October 2000
Usia : 21 years old
Alamat : Jl. R.H. Fisabilillah Km.8 atas Perumahan
Griya Permata Kharisma Jalan Permata
Utama nomor 06
Agama : Islam
E-mail : benaranggi123@gmail.com
Nomor *Handphone* / WA : 082287017823

B. DATA KELUARGA

Ayah Kandung : Ari Purnomo
Ibu Kandung : Efi Asfirawati

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN
SD	SD Negeri 002 Dabo Singkep	2006-2007
SD	SD Negeri 005 Lubuk Baja	2008-2012
SLTP	SMP Negeri 12 Kota Batam	2012-2015
SLTA	SMK Negeri 2 Kota Batam	2015-2018
S1	STIE Pembangunan Tanjungpinang Program Studi Akuntansi	2018-2022